

PENINGKATAN KAPASITAS SDM KEUANGAN MELALUI IMPLEMENTASI TRI PANTANGAN DI KALURAHAN BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL

Sri Ayem¹; Titisa Ballerina², Umi Wahidah³, Agaphe Christian Abinowo⁴, Sri Mujiyanti⁵, Atik Hermawati⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

INFO NASKAH

Diserahkan

28 Oktober 2022

Diterima

12 Desember 2022

Diterima dan Disetujui

17 Juni 2023

Kata Kunci:

Tri pantangan, keuangan desa, Sumber Daya Manusia.

Keywords:

Tri Pantangan, Village Financial, human resources.

ABSTRAK

Kelurahan Bangunjiwo merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang menerima pendanaan dana desa paling besar pada tahun 2021. Pemberian dana desa tersebut harus dibarengi dengan kompetensi agar mampu mengelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Permasalahan yang dihadapi Kelurahan Bangunjiwo dalam pengelolaan keuangan dana desa yaitu keterbatasan kompetensi sumberdaya bidang keuangan. Tujuan dari kegiatan abdimas ini adalah untuk pengembangan kapasitas sumberdaya keuangan agar memahami peraturan pengelolaan dana desa, memperoleh pemahaman prinsip akuntansi, serta menyelenggarakan pelatihan dengan abdimas skema kemitraan. Selain itu pengabdian juga akan memberikan sosialisasi implementasi Tri Pantangan dalam pengelolaan keuangan dana desa, sebagai bekal moral PPKD. Pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan metode observasi, sosialisasi, dan pelatihan yang dihadiri 22 peserta yang terdiri unsur PPKD. Tindaklanjut dari Abdimas ini antara lain dapat dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa, terutama menggunakan accrual basis dimana Kementerian Keuangan RI mewacanakan pelaporan keuangan dana desa akan berubah dari kas basis menjadi accrual basis akrual.

Abstract. Bangunjiwo Village is one of the sub-districts in the Kasihan District area, Bantul Regency which has received the largest village fund funding in 2021. The provision of village funds must be accompanied by competence so that they are able to manage in accordance with applicable regulations, so as to be able to realize good financial governance. Good. The problem faced by the Bangunjiwo Village in the financial management of village funds is the limited competence of financial resources. The purpose of this abdimas activity is to develop the capacity of financial resources to understand village fund management regulations, gain an understanding of accounting principles, and organize training with partnership scheme abdimas. In addition, the servant will also provide socialization on the implementation of the Tri Abstinence in managing village fund finances, as a moral provision for PPKD. The implementation of community service used observation, socialization, and training methods which were attended by 22 participants consisting of PPKD elements. The follow-up from Abdimas includes assisting village financial management, especially using an accrual basis where the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia discussed that the financial reporting of village funds would change from a cash basis to an accrual basis.

1. PENDAHULUAN

Proyek pengabdian ini dilaksanakan di SDN Gadingkulon 2, sebuah sekolah dasar yang berada di pedalaman, di sebuah dusun bernama Princi, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Gadingkulon memiliki kearifan lokal yang beragam diantaranya berupa tarian, makanan khas, bangunan bersejarah, produk pertanian khas, dan lain-lain. Salah satu kearifan yang paling mencolok adalah aktifitas pertanian serta produk hasil pertanian yang di dominasi oleh jeruk. Gadingkulon dan beberapa desa di sekitarnya merupakan penghasil jeruk terbesar di Kabupaten Malang.

Dari hasil observasi langsung serta wawancara yang dilakukan dengan para guru di sekolah SDN Gadingkulon 2, diketahui bahwa para guru dan sekolah memiliki beragam permasalahan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, guru masih kurang bisa memaksimalkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai topik dan bahan ajar di kelas. Kebanyakan guru lebih memilih untuk menggunakan buku ajar yang disediakan oleh Dinas dengan isi yang kurang merujuk pada nilai-nilai kelokalan yang ada di desa Gadingkulon. Kedua, LKPD yang ada masih kurang kontekstual. Kebanyakan guru lebih memilih menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang bisa dengan mudah diakses di pasaran, dengan fokus yang bersifat umum sehingga kurang fokus pada nilai-nilai kearifan lokal khusus yang merujuk pada Desa Gadingkulon. Ketiga, belum ada LKPD yang menyajikan materi bermuatan nilai-nilai kearifan lokal Desa Gadingkulon yang disampaikan secara dwibahasa (*bilingual*) bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini tentunya menjadi kelemahan dalam pemahaman dan penyampaian materi-materi tentang lokalitas daerah siswa yang menjadikannya kurang berorientasi global. Keempat, penggunaan buku dan LKPD umum tersebut, ditambah minimnya penggunaan referensi-referensi lokal desa, menjadikan siswa kurang mengenal dan mengapresiasi kearifan lokal di daerahnya. Hal ini menumbuhkan kesenjangan atas nilai-nilai yang dipelajari di sekolah, dengan nilai-nilai nyata yang siswa lihat dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang membuat relevansi dari ajaran sekolah menjadi berkurang atau berbeda dengan kenyataan harian siswa.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan tersebut, maka proyek penelitian ini menjadikan penyusunan dan penerbitan LKPD *bilingual* untuk SDN Gadingkulon 2 sebagai tujuan utama. Dampak yang ingin dihasilkan dari proyek pengabdian ini adalah peningkatan yang nyata dari keempat permasalahan yang ada di lapangan seperti yang dijelaskan di atas. Setelah program pengabdian selesai, diharapkan kemampuan guru dalam memaksimalkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai topik dan bahan ajar di kelas meningkat. Selanjutnya, program pengabdian ini

juga menargetkan terciptanya LKPD kontekstual yang memuat nilai-nilai kearifan lokal Desa Gadingkulon, yang disampaikan dengan menggunakan pendekatan *Scientific Approach*. Ketiga, diharapkan terciptanya LKPD kontekstual yang disampaikan dalam dwibahasa (*bilingual*) bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terakhir, diharapkan dengan penggunaan LKPD kontekstual ini, pengetahuan dan apresiasi siswa terhadap kearifan lokal daerah mereka menjadi lebih meningkat.

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengkaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar dan dunia kerja, sehingga siswa mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Susiyanti dan Rosleny (2021), model pembelajaran ini berdasar kepada pandangan bahwa terdapat hubungan kausalitas yang menyambungkan berbagai fenomena sosial, budaya serta kemampuan dan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi dalam siklus-siklus yang berkesinambungan. Hal itu selanjutnya menjadi dasar bagi perkembangan kehidupan manusia agar muncul peningkatan dan menjadi lebih baik serta harmonis (Arieyanti, Lasmawan & Marhaeni, 2013).

Semangat itulah yang kemudian diangkat dan diterjemahkan dalam desain pembelajaran kontekstual di kelas dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal di sekitar sekolah dan tempat tinggal siswa sebagai topik utama dalam pengajaran. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter siswa yang mengenal berbagai nilai kearifan lokal di daerahnya, serta untuk mendorong rasa bangga akan nilai-nilai tersebut, sehingga siswa akan tumbuh menjadi individu yang mampu bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan, bahkan meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal di daerahnya demi kemajuan Bersama (Oktavianti & Ratnasari, 2018).

Pengenalan dan apresiasi terhadap kearifan lokal tersebut sangat penting untuk diasah sejak usia dini dan menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah dasar mengingat cepatnya arus globalisasi yang digawangi oleh gawai-gawai yang tersambung dengan Internet. Kemampuan dan kemajuan teknologi untuk menyambungkan individu dari berbagai daerah geografi lintas negara menjadi kesempatan dan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Anak-anak usia sekolah dasar yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan lingkungan disekitar mereka serta dunia yang lebih luas menjadi terfasilitasi oleh adanya teknologi Internet dan gawai. Akan tetapi, kesempatan tersebut harus bisa diimbangi dengan pengenalan nilai-nilai kearifan lokal di sekitar mereka dan penanaman rasa apresiasi dan

kebanggaan akan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah mereka (Oktavianti & Ratnasari, 2018).

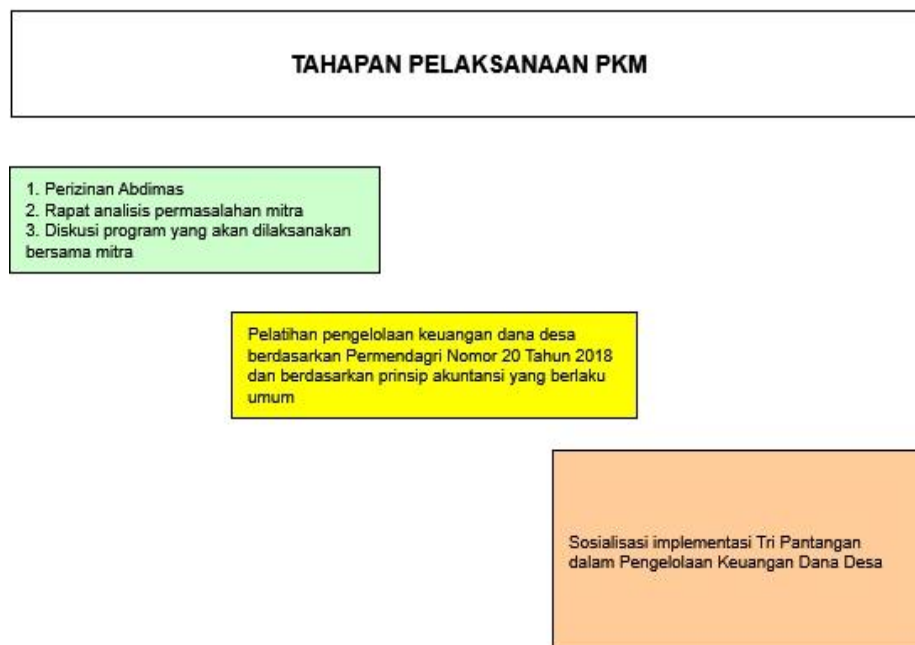
Selain itu, pengetahuan dan rasa bangga akan nilai-nilai lokal tersebut harus bisa disampaikan juga kepada dunia luas, yaitu dunia internasional. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengenalkan Bahasa Inggris dengan fokus utama untuk menyebutkan dan menceritakan tentang nilai-nilai kearifan lokal di sekitar siswa. Oleh karena itulah dalam pengabdian ini, dibuat salah satu bahas pembelajaran berupa Lembar kerja Peserta Didik (LKPD) dwibahasa (*bilingual*) Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

LKPD adalah salah satu bahan ajar yang umumnya berupa lembar-lembar berisi aktifitas dan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa dalam proses pembelajaran di kelas (Depdiknas, 2008). LKPD sangat penting dalam proses pembelajaran dan sangat membantu untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang tengah dibahas (Laili, Ambarita & Munaris, 2017). Dalam kurikulum 2013 yang saat ini berlaku, LKPD diharapkan untuk mengikuti pola pembelajaran khusus yang berbasis *Scientific Approach*.

Desain pembelajaran *Scientific Approach* merupakan sistem yang terencana dengan baik dalam usaha mencerdaskan sumber daya manusia khususnya peserta didik yang unggul, yang telah diamanatkan dalam Kurikulum 2013 (Kosasih, 2014; Machali, 2014). Pembelajaran berbasis *Scientific Approach* berakar pada pendekatan konstruktivisme dalam dunia Pendidikan. Pendekatan Konstruktivisme menuntut guru untuk memberikan ruang yang luas kepada siswa untuk secara aktif menggali informasi dan mencernanya sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang bisa mereka manfaatkan untuk berbagai tujuan peningkatan kualitas hidup. Dalam Kurikulum 2013, pendekatan *Scientific Approach* ini dilakukan dengan melibatkan enam komponen utama: bertanya (*questioning*), menyelidiki (*inquiry*), masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modeling*), refleksi (*reflection*), dan penilaian autentik (*authentic assessment*). Selain itu, seperti yang disyaratkan dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran berbasis *scientific approach* memiliki syntax baku yang sering dikenal sebagai 5M: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan (Rhosalia, 2017). Komponen-komponen utama dalam *scientific approach* tersebut akan menjadi kerangka utama dalam proses penyusunan LKPD dalam proyek pengabdian masyarakat ini.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan PKM menggunakan metode observasi, eksperimen, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Dalam analisis kebutuhan peralatan produksi dilaksanakan menggunakan metode observasi untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan dengan mencermati laporan keuangan desa. Metode pelatihan dan pendampingan digunakan untuk pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu juga dilakukan dengan metode sosialisasi untuk memaparkan terkait implementasi Tri Pantangan dalam pengelolaan keuangan desa. Program PKM dilaksanakan pada Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Tim pengabdian terdiri dari 3 dosen (Ketua dan 2 Anggota) serta melibatkan 3 mahasiswa yang berasal dari program studi akuntansi dan psikologi. Tahapan pelaksanaan Abdimas Peningkatan Kapasitas SDM Keuangan Melalui Implementasi Tri Pantangan di Kelurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Abdimas

Tahapan metode pelaksanaan pada bagan di atas dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Pertama

Pada tahap awal dilakukan koordinasi program kepada mitra dengan menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan dan proses perijinan kegiatan Abdimas. Selain itu memperkenalkan tim pengabdi dan menjelaskan agenda pelaksanaan kegiatan serta personil yang terlibat dalam kegiatan pengabdian. Tim pengabdi

melaksanakan FGD bersama Mitra untuk menentukan permasalahan yang akan diselesaikan bersama.

b. Tahap Kedua

Pada tahap kedua, tim pengabdian melaksanakan kegiatan pelatihan kepada PPKD meliputi: 1) Pelatihan pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, 2) Pelatihan pengelolaan keuangan dana desa sesuai prinsip akuntansi berterima umum.

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga, Tim Pengabdian melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada PPKD terkait materi Tri Pantangan, yaitu pantang menyalahgunakan kekuasaan, keuangan dan norma sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan metode sosialisasi yang dilaksanakan pada Jumat, 12 Agustus 2022 pukul 09.00-12.00 yang dihadiri 22 peserta yang terdiri unsur PPKD yaitu Lurah, Kasi, Kaur, dan perwakilan masyarakat. Acara Abdimas dibuka langsung oleh Lurah Bangunjiwo, H. Parja, S.T., M.Si. serta dihadiri oleh Kepala Seksi, Kepala Urusan, serta Dukuh dengan jumlah 22 peserta. Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu:

A. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Materi pertama disampaikan oleh Sri Ayem dan Umi Wahidah tentang pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.) disebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sementara, pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.) menyebutkan asas pengelolaan keuangan yaitu:

a. Transparan

Terbuka – keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang

berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan tersebut dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses /mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

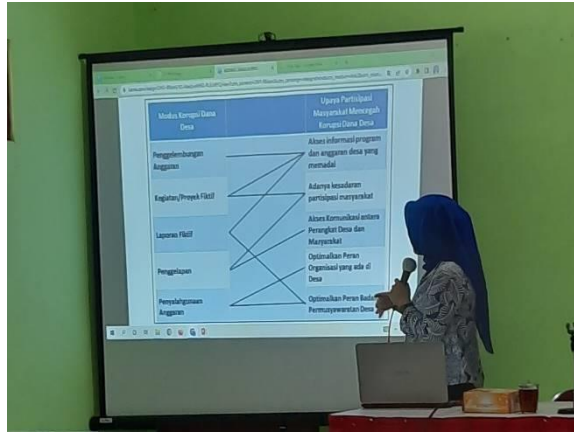
c. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di

desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Penyampaian Materi Pengelolaan Keuangan Desa
(sumber: dokumentasi pribadi)

B. Sosialisasi Implementasi Tri Pantangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pada sesi kedua disampaikan sosialisasi Implementasi Tri Pantangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang disampaikan oleh Titisa Ballerina dalam materinya, beliau menyampaikan tentang Ajaran Tamansiswa salah satunya berupa TRILOGI yang didalamnya terdapat Tri Pantangan : Tiga larangan dalam Tamansiswa. Tri pantangan yang dimaksud dalam ajaran Ki Hadjar Dewantara adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang yang ingin meraih kesuksesan adalah Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, penyalahgunaan keuangan dan pelanggaran kesusilaan/moral. Tiga larangan dalam Tamansiswa menurut Buku Ketamansiswaan (Trisharsiwi et al., 2020):

- a. Larangan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki
- b. Larangan pelanggaran kesusilaan
- c. Larangan penyelewengan keuangan, termasuk larangan tak tertulis bahwa ketua menjabat sebagai bagian bendahara atau istri ketua menjabat sebagai bendahara.

Implementasi Tri Pantangan dalam pengelolaan keuangan dana desa diharapkan seluruh PPKD Kelurahan Bangujiwo yang terlibat tidak melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan rakyat. Sehingga seluruh PPKD mampu menjalankan amanah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadi

ketidaksesuaian pengelolaan keuangan desa (Primayogha, 2022), diantaranya:

- Minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa
- Minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa
- Terbatasnya akses warga terhadap informasi anggaran desa
- Keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan dalam mengelola uang dalam jumlah besar.



Gambar 2. Implementasi Tri Pantangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa
(sumber: dokumentasi pribadi)

Tabel 1. Hasil evaluasi program abdimas yang telah terlaksana yang terukur dalam persen.

Jenis Permasalahan	Solusi	Luaran	Evaluasi
	Pelatihan pengelolaan keuangan desa	80% PPKD memahami pengelolaan keuangan berdasarkan regulasi	100% kegiatan telah terlaksana, namun masih memerlukan pendampingan terhadap dalam pengelolaan keuangan secara berkelanjutan, terutama penggunaan accrual basis.
Sumberdaya	Sosialisasi implementasi Tri Pantangan dala pengelolaan keuangan desa	50% PPKD memahami implementasi Tri Pantangan dalam pengelolaan keuangan desa	100% kegiatan telah dilaksanakan, tingkat pemahaman saat sosialisasi sudah mencapai 50%, namun masih perlu dilakukan pendampingan secara berkelanjutan sebagai upaya pencegahan penyimpangan keuangan (fraud)

Tabel 2. Dampak sosial dan atau dampak ekonomi

Jenis Permasalahan	Solusi	Luaran	Dampak Sosial Sosial dan Ekonomi
Sumberdaya	Pelatihan pengelolaan keuangan desa	80% PPKD memahami pengelolaan keuangan berdasarkan regulasi	Meningkatnya pengetahuan sumberdaya yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam memahami Permendagri No 20 Tahun 2018 dan implementasinya dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, PPKD mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
	Sosialisasi implementasi Tri Pantangan dala pengelolaan keuangan desa	50% PPKD memahami implementasi Tri Pantangan dalam pengelolaan keuangan desa	Peningkatan kesadaran PPKD dalam pengelolaan keuangan melalui implementasi Tri Pantangan, diharapkan mampu meminimalisir tindakan penyelewengan (fraud). Sehingga keuangan desa dapat di optimalkan untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mitra kegiatan Abdimas yaitu Kelurahan Bangunjiwo, Bantul dalam kegiatan ini berkontribusi dalam menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan yaitu ruangan, meja, kursi, viewer, dan sound untuk kegiatan Abdimas. Selain itu, mitra juga berkontribusi menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses observasi dan mengkondisikan seluruh peserta pengabdian. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya mengatur waktu pertemuan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang kebetulan pada bulan Agustus ini sudah memiliki agenda, sehingga Tim Pengabdi harus menunggu untuk menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan. Faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan Abdimas “Peningkatan Kapasitas SDM Keuangan Melalui Implementasi Tri Pantangan di Kalurahan Bangunjiwo” tidak lepas dari komitmen Lurah dan seluruh PPKD dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Semangat inilah yang menjadi faktor pendukung kegiatan Abdimas ini dapat terlaksana dengan baik.

4. SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat tentang peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan e-commerce menghasilkan beberapa kegiatan sebagai berikut.

- Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dana desa yaitu asas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran

- b. Terselenggaranya sosialisasi terkait implementasi Tri Pantangan dalam pengelolaan keuangan.
- c. Terlaksananya partisipasi mahasiswa Fakultas Ekonomi UST untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Kelurahan Bangunjiwo, Kasihan Bantul)

Saran

a. Solusi

Solusi dari penentuan jadwal pelaksanaan yang sulit, Tim Abdimas mengatur kembali waktu pertemuan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) untuk menyelenggarakan kegiatan Abdimas bersamaan dengan agenda rapat PPKD.

b. Tindak Lanjut

Tindaklanjut dari Abdimas ini antara lain dapat dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa, terutama menggunakan accrual basis. Kementerian Keuangan RI mewacanakan pelaporan keuangan dana desa akan berubah dari kas basis menjadi accrual basis yang tentunya memerlukan pendampingan intensif dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwirman, Oktaviani, R.N., Novriadi, Desmawati, Suryadi, A., 2022. Pelatihan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora* 1, 69–73.
- Febriady, A., 2022. Eks Kades dan Anaknya di Pasangkayu Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 700 Juta [WWW Document]. URL <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6071565/eks-kades-dan-anaknya-di-pasangkayu-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-700-juta>
- Khotami, 2017. The Concept Of Accountability In Good Governance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 163, 30–33.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021, 2021. Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Primayogha, E., 2022. Lonjakan Korupsi Di Desa [WWW Document]. *Indonesia Corruption Watch (ICW)*. URL <https://www.antikorupsi.org/id/article/lonjakan-korupsi-di-desa> (accessed 7.25.22).
- Rosyidah, U., 2018. Upgrading Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Di Desa Nyurlembang Narmada Lombok Barat. *Jurnal Tranformasi* 14, 35–42.
- Trisharsiwi, Prihatni, Y., Karyaningsih, E.W., Hangestiningsih, E., Sumiyati, Y., Susanto, R.,

- Yasin, I., Wijayanto, Z., Setiawan, A.D., Al Majid, A., Taryatman, Ballerina, T., Kartikasari, E., Sudrahat, I.S., 2020. Ketamansiswaan. UST-Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, n.d. No Title.
- Yusup, M., Abdullah, J., Wahyudin, H., 2019. Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* 10, 189–209.